

Katalog: 4301002.1473

ISSN 3031-4690

STATISTIK PENDIDIKAN KOTA DUMAI



2023

Volume 3, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DUMAI**

Katalog: 4301002.1473

ISSN 3031-4690

STATISTIK PENDIDIKAN KOTA DUMAI

<https://dumaikota.bps.go.id>

2023

Volume 3, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DUMAI**

Statistik Pendidikan Kota Dumai 2023

Volume 3, 2024

Katalog : 4301002.1473
ISSN. : 3031-4690
No. Publikasi : 14730.24005
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii+58 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Tim Penyusun
Statistik Pendidikan Kota Dumai 2023

Pengarah

Morhan Tambunan

Penanggung Jawab

Siswiny Marito Octalya Br. Tambunan

Penyunting

Rinanda Herselina Br. Ginting

Penulis Naskah

Siswiny Marito Octalya Br. Tambunan

Primavera Dian Rizkiani

Pengolah Data

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penata Letak

Rinanda Herselina Br. Ginting

Primavera Dian Rizkiani

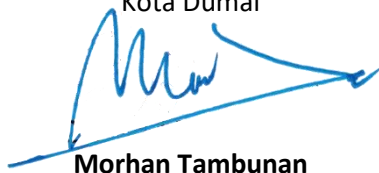
Kata Pengantar

Pendidikan adalah proses terencana sebagai investasi masa depan, sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya dan mengambil peran dalam kehidupan. Pendidikan yang bermutu menjadi modal sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter.

Statistik Pendidikan BPS Kota Dumai 2023 menggambarkan potret pendidikan di Kota Dumai berdasarkan hasil Susenas Maret 2022 dan 2023. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan output pendidikan. Selain itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang dikumpulkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama. Data ini memuat informasi mengenai jumlah sekolah, guru, dan peserta didik.

Kehadiran publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pendidikan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan publikasi di masa yang akan datang.

Dumai, Juni 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Dumai



Morhan Tambunan

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Tabel	ix
Bab 1 Pendahuluan	3
Pendidikan di Masa Endemi	4
Pembangunan Pendidikan, Kini dan Nanti	4
Indikator Pendidikan sebagai Monitoring Pembangunan	6
Sistematika Penulisan	7
Bab 2 Metodologi	11
Sumber Data	11
Konsep dan Definisi	11
Bab 3 Sarana dan Prasarana Pendidikan	19
Bab 4 Partisipasi Sekolah	29
Bab 5 Kegiatan Peserta Didik	39
Bab 6 Hasil dan Capaian Proses Pendidikan	45
Hasil Penghitungan <i>Sampling Error</i>	52
Daftar Pustaka	57

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023	20
Tabel 3.2	Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan (MI, MTs, dan MA) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023	22
Tabel 3.3	Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023	23
Tabel 3.4	Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023	25
Tabel 3.5	Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan (MI, MTs, dan MA) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023	26
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2023	30
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2022	31
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023	32
Tabel 4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023	33
Tabel 4.5	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023	35
Tabel 5.1	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler dan Komputer serta Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir di Kota Dumai, 2023	40
Tabel 5.2	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga di Kota Dumai, 2023	41
Tabel 6.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi, 2020-2023	47

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Persentase Sekolah Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di Kota Dumai pada Tahun Ajaran 2022/2023.....	21
Gambar 3.2	Persentase Jumlah Peserta Didik Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan (MI, MTs dan MA) di Kota Dumai pada Tahun Ajaran 2022/2023.....	24
Gambar 4.1	APM Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2022-2023.....	35
Gambar 5.1	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler dan Komputer serta Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai, 2023.....	40
Gambar 6.1	Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2022-2023.....	46
Gambar 6.2	Rata-rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2022-2023.....	48

BAB 1

PENDAHULUAN



Bab 1

Pendahuluan

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan Ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional itu sendiri mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia untuk berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Berdasarkan visi tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagaimana yang juga tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait amanat negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Pendidikan, dalam pengertiannya yang paling luas, memainkan peran yang makin besar untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara manusia untuk hidup dan bertindak. Pendidikan pun menjadi investasi masa depan, karena dengan pendidikan manusia mampu menyesuaikan cara berpikirnya mengembangkan segala potensi diri, dan mengambil peran dalam kehidupan. Pendidikan menjadi modal dalam mengantarkan negara dan masyarakat berinteraksi pada skala global menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Meskipun bukan jalan yang singkat untuk dapat dilalui namun merupakan salah satu bekal yang bisa diandalkan dan secara tidak langsung menjadi modal pembangunan bagi negara.

Pendidikan di Masa Endemi

Di Indonesia, pendidikan selama masa endemi menghadapi tantangan yang cukup kompleks, namun juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam upaya menjaga kontinuitas pembelajaran. Beberapa pembatasan dilakukan untuk memitigasi pandemi yang telah mengakibatkan adanya *learning loss* yang dialami oleh peserta didik. Penyederhanaan kurikulum dilakukan agar dapat diaplikasikan dalam kondisi darurat saat itu. Namun, karena adanya beberapa pertimbangan yaitu salah satunya kesiapan dari masing-masing satuan pendidikan, saat ini pemerintah memberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih.

Meskipun pendidikan di masa endemi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, juga ada upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pendidikan dan mengatasi kesenjangan akses serta kualitas pendidikan di seluruh negeri. Dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan bahwa pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan Pendidikan, Kini dan Nanti

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Oleh karena itu bidang ini menjadi satu dari 17

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*), tepatnya pada tujuan ke-4 yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. RPJMN 2020-2024 tersebut merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pendidikan menjadi bagian dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Fokus utama pembangunan pendidikan pada RPJMN 2020-2024 masih kepada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Tingkat pendidikan masyarakat telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sayangnya, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).

Salah satu tantangan dalam pembangunan pendidikan sebagaimana yang diulas dalam narasi RPJMN 2020-2024 adalah adanya revolusi industri 4.0. Semakin berkembangnya teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam membantu proses

pembangunan di bidang pendidikan yaitu melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*).

Indikator Pendidikan sebagai Monitoring Pembangunan

Pendidikan dan pembangunan berada dalam suatu proses yang saling mengisi. Proses pendidikan menempatkan manusia sebagai pusat, karena pendidikan mempunyai tugas menghasilkan SDM yang berkualitas untuk pembangunan bangsa. Parameter dari keberhasilan suatu sistem pendidikan adalah dengan melihat hasil capaian pendidikan. Hal ini juga menjadi satu cara untuk memprediksi masa depan bangsa.

Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan yang strategis dan tepat sasaran. Dengan adanya informasi tersebut maka situasi serta kondisi pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini akan lebih tergambar. Informasi dan perencanaan yang matang diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan di bidang pendidikan yang sedang dan akan dihadapi. Potret situasi, kondisi, dan capaian pembangunan bidang pendidikan di Indonesia pada tahun 2023 salah satunya tercermin pada beberapa indikator pendidikan yang disajikan dalam publikasi “Statistik Pendidikan Kota Dumai 2023”.

Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai dunia pendidikan yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 dan 2023 serta data sekunder dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama tahun ajaran 2021/2022 dan 2022/2023. Data yang disajikan didisagregasi menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin sehingga diharapkan mampu menggambarkan pemerataan pendidikan di Kota Dumai.

Sistematika Penulisan

Secara sistematis Publikasi Statistik Pendidikan Kota Dumai Tahun 2023 disajikan dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan, yang menceritakan bagaimana gambaran pendidikan di masa endemi, pembangunan pendidikan saat ini dan nanti, pentingnya data pendidikan sebagai monitoring pembangunan, serta sistematika penulisan dari publikasi.

Bab II

Metodologi, memaparkan sumber data serta konsep dan definisi.

Bab III

Sarana dan Prasarana Pendidikan, memaparkan jumlah sekolah, peserta didik, guru, serta rasio guru dan murid baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun yang berada di bawah Kementerian Agama.

Bab IV

Partisipasi Sekolah, yaitu tentang Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk setiap kategori.

Bab V

Kegiatan Peserta Didik, memaparkan tentang penggunaan komputer, telepon seluler, internet, serta aktivitas bekerja dan mengurus rumah tangga bagi penduduk usia sekolah.

Bab VI

Hasil dan Capaian Proses Pendidikan, menjelaskan angka melek huruf, kemampuan membaca dan menulis, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah.

Selanjutnya pada akhir bab akan disajikan hasil penghitungan *sampling error* guna melihat tingkat kesalahan yang ditimbulkan oleh teknik pengambilan sampel. Sementara penjelasan mengenai konsep definisi disajikan dalam catatan teknis.

BAB 2

METODOLOGI



Bab 2

Metodologi

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan Statistik Pendidikan Kota Dumai 2023 ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022 dan 2023. Susenas memiliki cakupan data sosial paling luas bila dibandingkan dengan survei-survei yang lain. Di dalam Susenas mencakup banyak data yang diantaranya adalah data pendidikan. Selain itu, untuk melengkapi kebutuhan data pendidikan yang lainnya, beberapa data diperoleh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama.

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi diperlukan untuk menghindari cara pandang, persepsi maupun anggapan yang berbeda. Adapun konsep definisi yang digunakan dalam indikator pendidikan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bersekolah, adalah mendapat pendidikan atau pengajaran di sekolah. Dikatakan bersekolah apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar, baik di suatu jenjang formal maupun non formal (program kesetaraan Paket A/B/C) yang berbeda di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun kementerian lainnya.
- b. Umur, adalah lama waktu hidup sejak dilahirkan.
- c. Tidak/Belum pernah bersekolah, adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal, termasuk juga yang tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
- d. Masih Bersekolah, adalah anggota berumur 5 tahun ke atas yang terdaftar

dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal, yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun kementerian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah maupun institusi swasta. Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.

- e. Tidak bersekolah lagi, adalah anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun kementerian lainnya), yang pada saat pendataan/survei sudah tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.
- f. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.
- g. Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Paket A/B/C). Pendidikan formal dan non formal yang dimaksud di sini adalah yang berada dibawah pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun kementerian lainnya.
- h. Angka Melek Huruf (AMH), adalah proporsi penduduk usia tertentu yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya, terhadap kelompok penduduk usia tertentu. Angka ini digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai di suatu daerah, karena melek huruf (membaca dan menulis) merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$AMH = \frac{\text{Banyaknya penduduk usia tertentu yang dapat membaca dan menulis}}{\text{Banyaknya penduduk usia tertentu}} \times 100$$

- i. Angka Partisipasi Kasar (APK), adalah proporsi dari semua anak yang sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia jenjang tertentu. APK ini digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$APK = \frac{\text{Banyaknya penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu}} \times 100$$

- j. Angka Partisipasi Sekolah (APS), adalah proporsi dari semua anak pada suatu kelompok umur tertentu yang masih sekolah terhadap penduduk pada kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS ini bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu.

Rumus yang digunakan adalah:

$$APS = \frac{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu yang sedang sekolah}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu}} \times 100$$

- k. Angka Partisipasi Murni (APM), adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya, terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan. APM ini digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya.

Rumus yang digunakan adalah:

$$APM = \frac{\text{Banyaknya pddk usia sekolah tertentu yg sekolah pada jenjang yg sesuai}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu}} \times 100$$

- l. Rata-rata Lama Sekolah, adalah rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Proses penghitungannya menggunakan tiga variabel simultan, yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan, dan ijazah tertinggi yang dimiliki. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang yang ditamatkan.
- m. Harapan Lama Sekolah, didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Rumus yang digunakan adalah:

$$HLS_a^t = FK \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

FK : Faktor koreksi pesantren

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i : usia ($a, a+1, \dots, n$)

- n. Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- o. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang yang ditandai dengan sertifikat/ijazah. SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

SM/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat.

PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I/II/III, DIV/S1, S2, S3 dan sederajat.

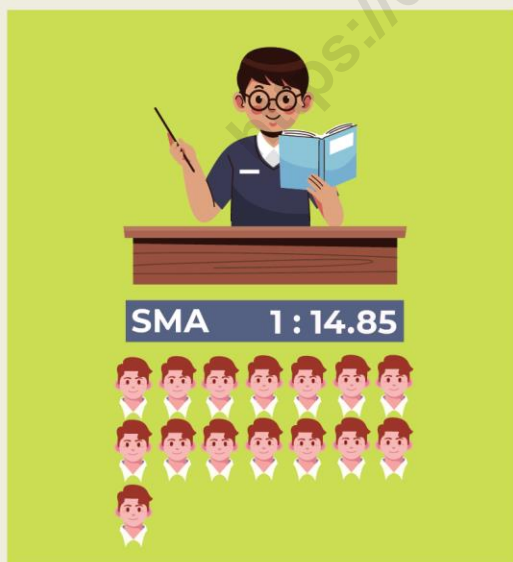
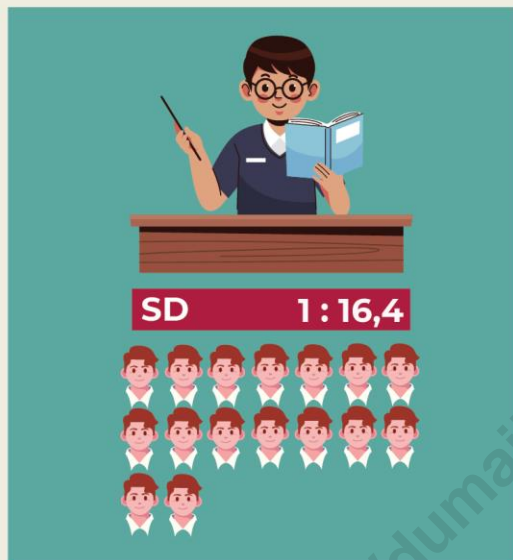
Estimasi dari sampel survei dipengaruhi oleh dua jenis *error* (kesalahan) yaitu *sampling error* dan *non sampling error* (seperti kesalahan dalam wawancara dan kesalahan pengolahan). *Sampling error* adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik sampling dalam suatu survei. Besarnya *sampling error* secara teori statistik ditunjukkan oleh besarnya angka *standard error* dari suatu angka estimasi persentase suatu variabel yang disajikan dari hasil Susenas 2022 dan 2023.

Untuk mengukur presisi dari suatu angka estimasi digunakan besarnya *relative standard error*, yaitu rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%). Dengan menggunakan selang kepercayaan 95 persen, dapat disajikan estimasi interval (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error*.

BAB 3

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Rasio Murid per Guru di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi



Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid.



Bab 3

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi bagian dari standar pendidikan nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003, bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana pendidikan harus tersedia semaksimal mungkin guna mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan tanpa ada kendala. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti sekolah yang dekat dengan tempat tinggal siswa atau transportasi publik yang dapat diakses dengan mudah, dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Ini akan memungkinkan lebih banyak siswa untuk mengakses pendidikan tanpa hambatan fisik yang signifikan. Selain itu fasilitas pembelajaran yang lengkap dan modern, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, laboratorium ilmiah, dan fasilitas olahraga, dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Fasilitas-fasilitas ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan lebih efektif dan menumbuhkan minat mereka dalam pembelajaran.

3.1. Jumlah Sekolah

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Salah satu upaya yang cukup terasa dalam beberapa tahun terakhir adalah kebijakan zonasi

dalam sistem penerimaan peserta didik baru. Sejak tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai salah satu strategi percepatan pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan.

Tabel 3.1. Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di Kota Dumai, 2021/2022 dan 2022/2023

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun Ajaran	
	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)
Sekolah Dasar	108	108
Negeri	87	87
Swasta	21	21
Sekolah Menengah Pertama	39	39
Negeri	22	22
Swasta	17	17
Sekolah Menengah Atas	15	15
Negeri	7	7
Swasta	8	8
Sekolah Menengah Kejuruan	17	17
Negeri	7	7
Swasta	10	10

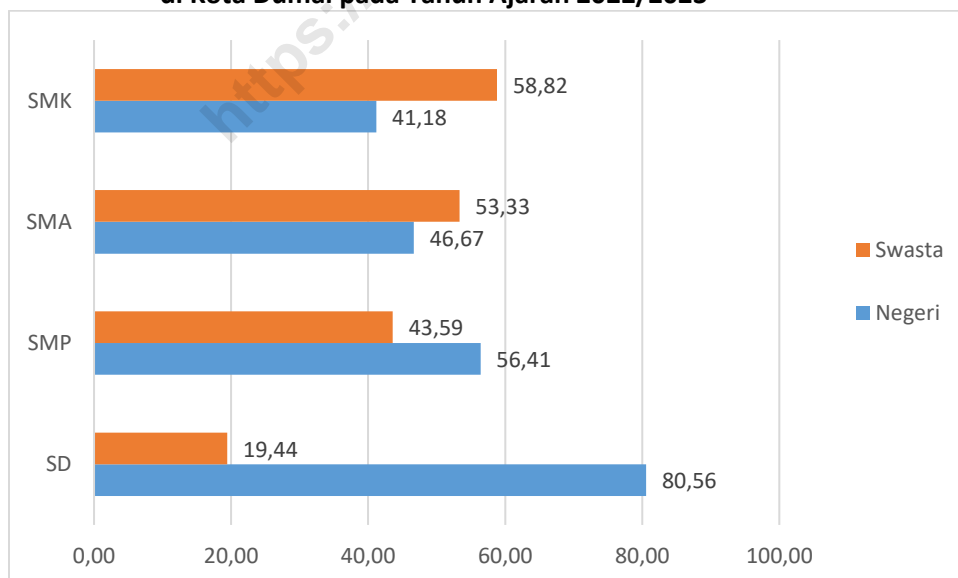
Sumber: Publikasi Provinsi Riau dalam Angka 2023 dan 2024

Berdasarkan Tabel 3.1, terlihat bahwa jumlah sarana sekolah di seluruh tingkatan pendidikan tidak ada perubahan sejak tahun ajaran 2021/2022 hingga tahun ajaran 2022/2023. Sedangkan prasarana sekolah lainnya yaitu Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Atas serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berstatus negeri maupun swasta memiliki jumlah sekolah yang tetap sejak tahun ajaran 2021/2022 hingga tahun ajaran 2022/2023 termasuk juga Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus negeri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, penyelenggara pendidikan di Indonesia bukan hanya sebatas pemerintah saja, melainkan juga dapat melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa kontribusi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Dumai cukup tinggi, khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas serta pendidikan menengah kejuruan. Persentase jumlah SMK negeri dibandingkan swasta cukup jauh perbedaannya yaitu 41,18 persen berbanding 58,82 persen, persentase jumlah SMA negeri dibandingkan swasta perbedaannya yaitu 44,67 persen dibanding 55,33 persen.

Gambar 3.1. Persentase Sekolah Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di Kota Dumai pada Tahun Ajaran 2022/2023



Sumber: Publikasi Provinsi Riau dalam Angka 2023 dan 2024

Selain sekolah umum yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, juga terdapat sekolah umum yang dikelola oleh Kementerian Agama. Sekolah tersebut juga setingkat SD hingga setingkat SMA. Pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2022/2023 di Kota Dumai terdapat 7 unit Madrasah Ibtidaiyah, 19 unit Madrasah Tsanawiyah dan 11 unit Madrasah Aliyah. Masing-masing jenjang Pendidikan tersebut juga ada yang berstatus sebagai sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Pada tahun ajaran 2022/2023, diantara 3 jenjang pendidikan, Madrasah Tsanawiyah dengan status negeri merupakan sekolah terbanyak yang dikelola oleh Kementerian Agama. Penambahan jumlah sekolah dalam satu tahun terjadi pada jenjang sekolah Madrasah Aliyah yaitu sebanyak 1 unit, sedangkan untuk jenjang Pendidikan lainnya masih memiliki jumlah yang tetap.

Tabel 3.2. Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Agama Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di Kota Dumai, 2021/2022 dan 2022/2023

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun Ajaran	
	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)
Madrasah Ibtidaiyah	7	7
Negeri	1	1
Swasta	6	6
Madrasah Tsanawiyah	19	19
Negeri	2	2
Swasta	17	17
Madrasah Aliyah	10	11
Negeri	1	1
Swasta	9	10

Sumber: Publikasi Provinsi Riau dalam Angka 2023 dan 2024

3.2 Jumlah Peserta Didik

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa peserta didik SMK tahun ajaran 2022/2023 di Kota Dumai lebih banyak jika dibandingkan dengan peserta didik SMA (sekitar 7 ribu siswa berbanding 6 ribu siswa). Hal tersebut menggambarkan tingginya minat peserta didik untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan. Langkah ini diharapkan dapat menjawab keinginan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja melalui lulusan-lulusan SMK sebagai tenaga kerja terampil dan memiliki daya saing dalam dunia kerja.

Tabel 3.3. Jumlah Murid di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di Kota Dumai, 2021/2022 dan 2022/2023

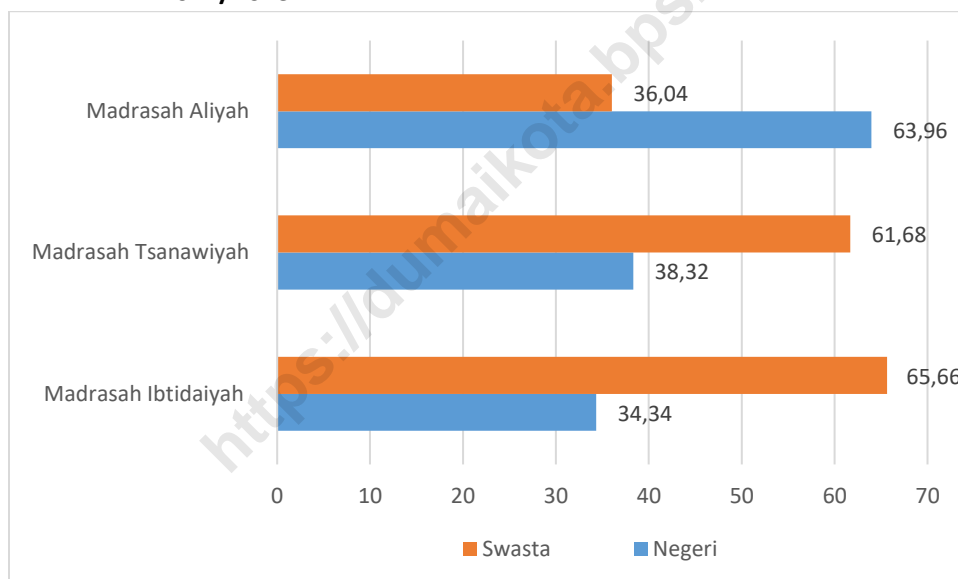
Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun Ajaran	
	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)
Sekolah Dasar	38.456	38.054
Negeri	32.167	31.609
Swasta	6.289	6.445
Sekolah Menengah Pertama	13.780	13.355
Negeri	10.775	10.446
Swasta	3.005	2.909
Sekolah Menengah Atas	6.379	6.357
Negeri	5.086	5.121
Swasta	1.293	1.236
Sekolah Menengah Kejuruan	8.817	7.842
Negeri	6.636	6.151
Swasta	2.181	1.691

Sumber: Publikasi Provinsi Riau dalam Angka 2023 dan 2024

Sebagian besar peserta didik bersekolah pada sekolah negeri daripada swasta. Pertimbangan biaya sekolah yang lebih rendah karena telah mendapatkan

subsidi dari pemerintah menjadi salah satu daya tarik dari sekolah negeri. Peserta didik di sekolah negeri pada jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK lebih didominasi oleh sekolah negeri. Berbeda dengan sekolah yang dikelola oleh Departemen Pendidikan, untuk sekolah tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang dikelola oleh pihak swasta di Kota Dumai lebih diminati daripada yang bersatus negeri pada tahun ajaran 2022/2023. (Gambar 3.2).

Gambar 3.2 Persentase Jumlah Peserta Didik Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan (MI, MTs dan MA) di Kota Dumai pada Tahun Ajaran 2022/2023



Sumber: Publikasi Provinsi Riau dalam Angka 2023 dan 2024

3.3 Beban Kerja Guru

Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio murid-guru. Angka ini mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah, berarti semakin mengurangi efektivitas proses

pembelajaran karena tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang yang akan berpengaruh pada mutu pengajaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, SMK rasio murid guru masih di bawah standar ideal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 3.4. Rasio Murid per Guru di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di Kota Dumai, 2021/2022 dan 2022/2023

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun Ajaran	
	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)
Sekolah Dasar	17,38	16,40
Negeri	17,47	16,57
Swasta	16,91	15,61
Sekolah Menengah Pertama	14,79	14,53
Negeri	15,11	14,86
Swasta	13,72	13,47
Sekolah Menengah Atas	15,71	14,85
Negeri	17,07	16,10
Swasta	11,97	11,24
Sekolah Menengah Kejuruan	16,06	14,26
Negeri	16,84	15,26
Swasta	14,07	11,50

Sumber: Publikasi Provinsi Riau dalam Angka 2023 dan 2024, diolah

Rasio murid guru tingkat MI, MTs dan MA juga berada pada standar ideal tersebut. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5. Rasio Murid per Guru di Bawah Kementerian Agama Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di Kota Dumai, 2021/2022 dan 2022/2023

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun	
	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)
Madrasah Ibtidaiyah	13,17	12,81
Negeri	15,57	15,73
Swasta	12,32	11,67
Madrasah Tsanawiyah	10,78	9,48
Negeri	15,92	15,92
Swasta	9,16	7,58
Madrasah Aliyah	7,01	6,78
Negeri	10,55	9,77
Swasta	4,76	4,39

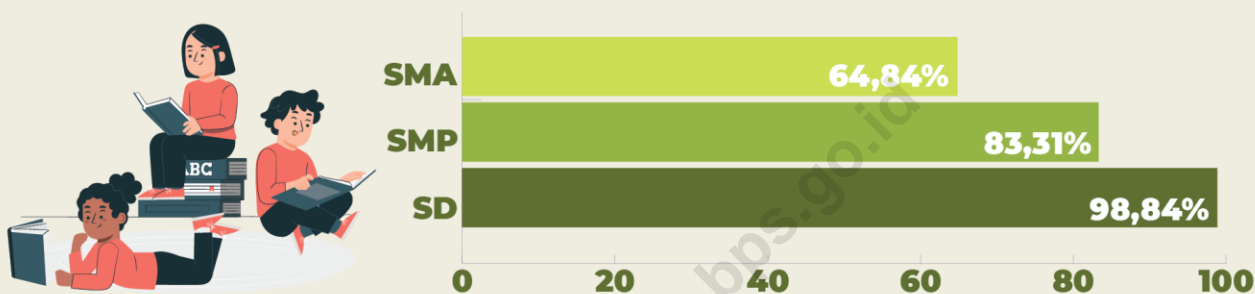
Sumber: Publikasi Provinsi Riau dalam Angka 2023 dan 2024, diolah

Rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak keberhasilan anak dalam proses belajar. Rasio murid-guru yang ideal akan bervariasi tergantung pada faktor lainnya. Rasio murid-guru di kelas tentunya akan proses belajar di kelas, tapi bukan satu satunya faktor penentu untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas.

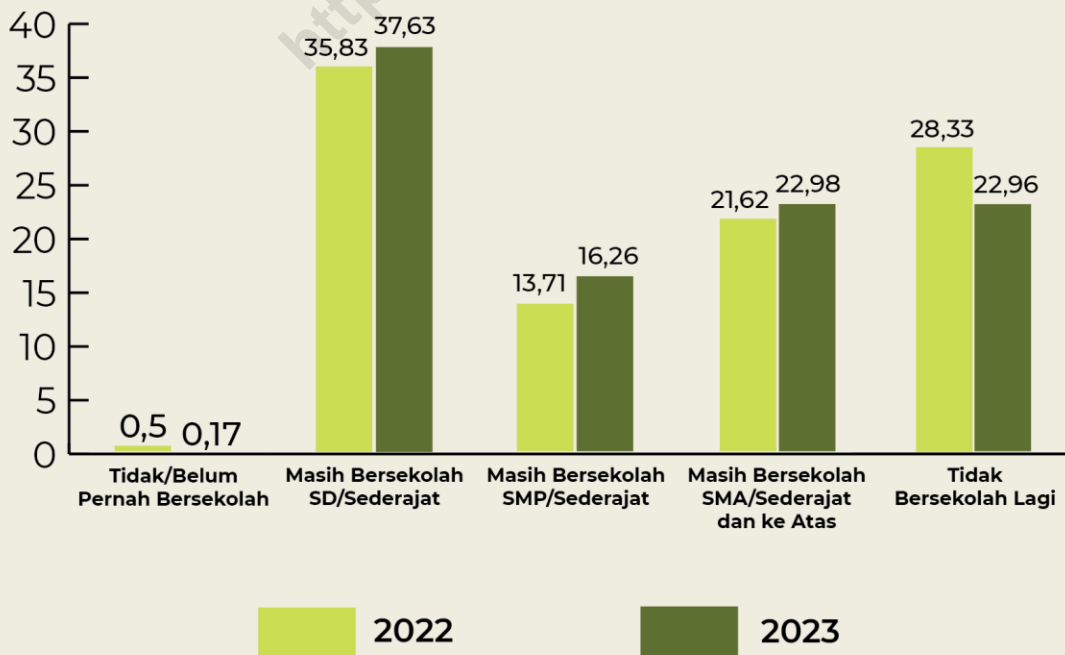
BAB 4

PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Partisipasi Murni (APM)



Persentase Penduduk Berumur 7-23 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah di Kota Dumai, Tahun 2022 dan 2023



Bab 4

Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan yang tertera pada UUD 1945 Pasal 28c dan 31. Pemenuhan hak tersebut tercermin dari sejauh mana pencapaian partisipasi sekolah yang merupakan hak setiap kalangan, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, termasuk juga penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan ke empat SDGs menjamin kualitas pendidikan inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Indikator partisipasi sekolah selain digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah diberikan pemerintah, juga untuk melihat apakah target yang ditetapkan pemerintah tercapai. Partisipasi sekolah menggambarkan efektivitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat, yang artinya semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2022 dan 2023 memperlihatkan hasil penghitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten menghasilkan indikator partisipasi sekolah setiap tahun. Upaya peningkatan capaian pendidikan diawali dengan mengetahui gambaran seberapa besar partisipasi sekolah penduduk. Partisipasi sekolah yang menunjukkan kemajuan yang baik, dapat mendorong capaian indikator outcome pendidikan seperti rata-rata lama sekolah. Informasi mengenai partisipasi sekolah menurut kelompok umur dan jenjang pendidikan membantu intervensi program pendidikan agar lebih tepat sasaran.

Bentuk peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dapat dilihat dari persentase partisipasi sekolah penduduk. Berdasarkan partisipasi sekolah,

penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah.

Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa pada tahun 2023 persentase penduduk 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah di Kota Dumai sebesar 4,16 persen; yang masih bersekolah sebesar 26,27 persen; dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 69,22 persen. Persentase penduduk laki-laki yang tidak bersekolah lagi lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2023

Partisipasi Sekolah	2023		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	4,26	4,06	4,16
Masih Bersekolah SD/Sederajat	12,69	13,95	13,30
Masih Bersekolah SMP/Sederajat	5,22	5,59	5,40
Masih Bersekolah SMA/Sederajat dan ke Atas	8,13	7,68	7,92
Tidak Bersekolah Lagi	69,70	68,72	69,22

Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2023

Penduduk usia sekolah 7-24 tahun memegang peranan penting dalam pembangunan. Keberhasilan pendidikan dengan terciptanya SDM unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi akan menjadi generasi harapan bangsa, *engine of growth*, dan lokomotif pembangunan. Usia 7-24 tahun merupakan rentang usia sekolah, hendaknya mereka yang berada pada rentang usia tersebut masih aktif melakukan kegiatan bersekolah tanpa terkecuali.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berumur 7-23 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023

Partisipasi Sekolah	2023		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	0,11	0,24	0,17
Masih Bersekolah SD/Sederajat	36,38	38,92	37,63
Masih Bersekolah SMP/Sederajat	15,76	16,77	16,26
Masih Bersekolah SMA/Sederajat dan ke Atas	23,76	22,18	22,98
Tidak Bersekolah Lagi	23,99	21,89	22,96

Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2023

Pada table 4.2. menunjukkan terdapat 0,17 persen penduduk usia 7-23 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah di Kota Dumai pada tahun 2023. Penduduk perempuan usia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah memiliki persentase yang lebih tinggi dari pada penduduk laki-laki usia 7-24 tahun.

4.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk usia tertentu.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa APS terbesar berada pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,86 persen atau dapat dikatakan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Semakin meningkat kelompok umur, APS semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya cenderung semakin menurun.

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023

Kelompok Umur	2023		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 - 12 Tahun	99,71	100,00	99,86
13 - 15 Tahun	96,89	92,72	94,75
16 - 18 Tahun	67,95	82,95	73,99
19-23 Tahun	34,83	34,27	34,54

Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2023

4.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Jika jumlah populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya siswa yang masuk suatu jenjang sekolah terlalu dini dibandingkan usianya, atau sebaliknya, lebih lambat dibandingkan usianya atau adanya pengulangan kelas oleh siswa.

Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 4.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	2023		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	105,34	107,45	106,41
SMP	91,31	88,63	89,93
SMA	72,58	102,44	84,60
Perguruan Tinggi	37,65	30,07	33,80

Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2023

Tabel 4.4 memperlihatkan APK jenjang pendidikan SD sampai Perguruan Tinggi (PT). APK jenjang pendidikan SD sebesar 106,41 persen, APK SMP sebesar 89,93 persen, APK SMA sebesar 84,60 persen dan APK PT sebesar 33,80 persen. APK pada jenjang pendidikan SD melebihi angka 100 persen yang menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar kelompok umur 7-12 tahun. Dengan kata lain, juga terdapat murid SD yang bersekolah dengan usia diluar interval umur 7-12 tahun. Banyak hal bisa menjadi alasan, antara lain beberapa orang tua terkadang mendaftarkan anaknya yang belum mencapai usia 7 tahun langsung ke sekolah dasar tanpa melewati PAUD terlebih dahulu atau mengulang kelas.

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Seharusnya sudah tidak ada lagi diskriminasi gender dalam memperoleh pendidikan di Indonesia seperti yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. APK laki-laki dan perempuan di Kota Dumai untuk tingkat SD sederajat dan SMP hampir tidak terdapat perbedaan. Namun, pada jenjang SMA, APK SMA perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan pada jenjang perGURUAN Tinggi (PT), APK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

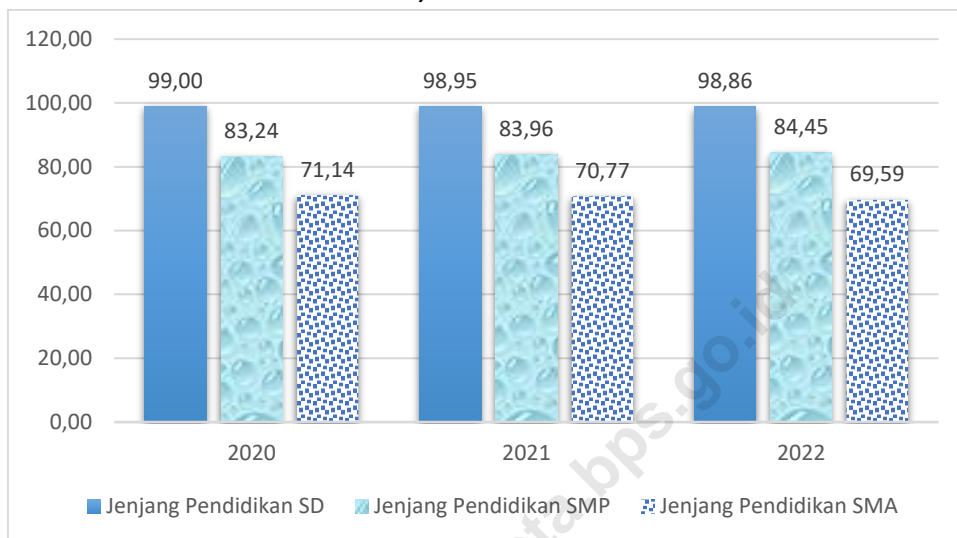
4.2 Angka Partisipasi Murni

Indikator lain yang dihasilkan dalam publikasi ini adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Angka Partisipasi Murni (APM) bertujuan untuk mengukur sejauh mana cakupan jenjang pendidikan tertentu bagi individu kelompok usia sekolah yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tersebut. APM mengindikasikan partisipasi sekolah tepat waktu dimana jenjang Pendidikan SD/sederajat (7-12 tahun), SMP/Seserajat (13-15 tahun) dan SM/Sederajat (16-18 tahun).

Gambar 4.1 memperlihatkan APM jenjang pendidikan SD/sederajat sampai dengan APM jenjang SM/sederajat. APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya.

Gambar 4.1 APM Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai,2020-2022



Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2023

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 pola APM di Kota Dumai memiliki kemiripan dengan pola APK. APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi yaitu 98,84 persen kemudian APM semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan gender, APM jenjang pendidikan SMA laki-laki lebih rendah daripada APM perempuan.

Tabel 4.5 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	2022		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	98,66	99,03	98,84
SMP	80,98	85,77	83,31
SMA	73,01	59,33	64,84

Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2023

BAB 5

KEGIATAN PESERTA DIDIK



81,88%

Peserta Didik Umur 5-24 Tahun
Mengakses Internet
Selama 3 Bulan Terakhir
di Kota Dumai Tahun 2023



<https://dumaikota.bps.go.id>



Terdapat

12,33% peserta didik laki-laki dan
7,04% peserta didik perempuan

Umur 10-24 Tahun **yang Bekerja**
di Kota Dumai Tahun 2023



Bab 5

Kegiatan Peserta Didik

Bagi penduduk usia 5-24 tahun, bersekolah merupakan salah satu kegiatan yang menghabiskan waktu terbanyak mereka sebagai seorang peserta didik. Sekolah menjadi sarana utama mereka untuk belajar dan berinteraksi dengan sesama. Akan tetapi, selepas kegiatan bersekolah peserta didik pun dapat melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan selepas bersekolah yang dilakukan oleh peserta didik tersebut dapat memengaruhi kualitas pendidikannya. Suatu kegiatan dapat berdampak positif apabila kegiatan tersebut bermanfaat dan mendukung proses belajar. Pada bab ini akan dibahas beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam hal mengakses teknologi informasi dan komunikasi (telepon seluler, komputer dan internet), bekerja, dan kegiatan mengurus rumah tangga.

5.1. Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pada era digital sekarang ini, kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pada era digital saat ini, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak terlepas dari aktivitas seluruh penduduk, termasuk para peserta didik di Indonesia.

Hasil Susenas Maret 2023 memperlihatkan bahwa dalam 3 bulan terakhir sebanyak 88,20 persen peserta didik umur 5-24 tahun di Kota Dumai menggunakan telepon seluler, 81,88 persen peserta didik umur 5-24 tahun mengakses internet dan 15,23 persen peserta didik umur 5-24 tahun menggunakan komputer (Tabel 5.1).

Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, rata-rata persentase perempuan dan laki-laki tidak terlalu berbeda dalam mengakses TIK. Penggunaan telepon seluler oleh peserta didik perempuan 91,33 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan peserta didik laki-laki sebesar 85,09 persen.

Tabel 5.1.

Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler dan Komputer serta Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir di Kota Dumai, 2023

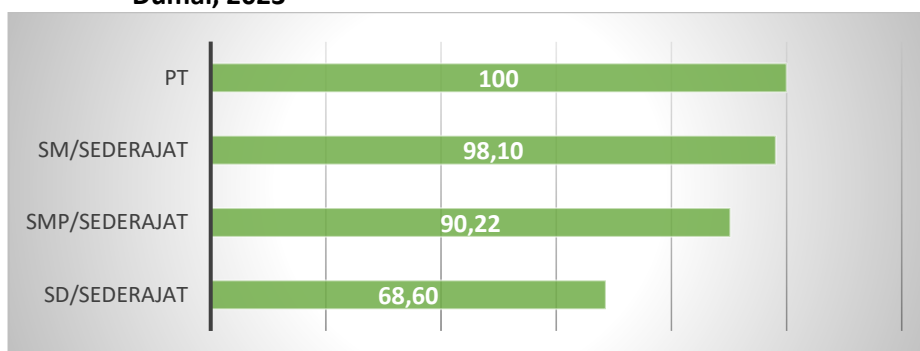
Jenis Kelamin	Menggunakan Telepon Seluler	Menggunakan Komputer	Mengakses Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	85,09	15,10	81,06
Perempuan	91,33	14,79	82,70
Laki-laki dan Perempuan	88,20	14,95	81,88

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Begitu juga dengan penggunaan komputer, persentase peserta didik perempuan yang menggunakan komputer sedikit lebih rendah dibandingkan peserta didik laki-laki (14,79 persen berbanding 15,10 persen). Sedangkan persentase peserta didik perempuan yang menggunakan internet sebesar 82,70 persen, lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan peserta didik laki-laki (81,06 persen).

Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, dapat diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka semakin meningkat pula persentase peserta didik yang menggunakan internet. Pada jenjang Pendidikan SD, terdapat sedikitnya 46 dari 100 peserta didik menggunakan internet (Gambar 5.1).

Gambar 5.1 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai, 2023



Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2023

Pada jenjang pendidikan SM dan PT, dari segi usia, mereka sudah lebih mandiri dan mudah untuk mendapatkan akses internet. Hal ini menjadi wajar apabila persentasenya semakin meningkat. Hampir semua peserta didik pada jenjang pendidikan SM/ sederajat dan perguruan tinggi telah mengakses internet selama tiga bulan terakhir.

5.2. Aktivitas Peserta Didik Selain Bersekolah

Selain aktivitas bersekolah, sebagian peserta didik juga melakukan aktivitas lainnya yaitu bekerja atau mengurus rumah tangga. Hal ini dikarenakan, usia peserta didik yang dianalisis pada publikasi ini yaitu yang berusia 5-24 tahun beririsan dengan usia bekerja (minimal 13 tahun untuk anak melakukan pekerjaan ringan menurut UU No. 13 Tahun 2003) dan usia perkawinan (minimal 19 tahun menurut UU No. 16 Tahun 2019). Akan tetapi, karena tujuan utama publikasi ini adalah untuk melihat aktivitas peserta didik secara keseluruhan, maka analisis yang digunakan dalam melihat kegiatan/aktivitas lain dibatasi pada peserta didik yang berusia 10-24 tahun. Pada tahun 2022, aktivitas peserta didik laki-laki usia 10-24 tahun yang bekerja sebesar 10,19 persen dan peserta didik perempuan sebesar 7,49 persen.

Tabel 5.2. Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga di Kota Dumai, 2023

Jenis Kelamin	Bekerja	Mengurus Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	12,33	26,95
Perempuan	7,04	44,52
Laki-laki dan Perempuan	9,73	35,57

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Selain belajar, kegiatan peserta didik lainnya bisa berupa membantu mengurus rumah tangga. Kegiatan mengurus rumah tangga meliputi kegiatan mengurus atau membantu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya. Dari 100 peserta didik umur 10-24 tahun, ada sebanyak 35 peserta didik yang mengurus rumah tangga selama seminggu terakhir. Jika dilihat dari jenis kelamin, persentase peserta didik perempuan yang mengurus rumah tangga lebih besar (44,52 persen) dibandingkan peserta didik laki-laki (26,95 persen).

<https://dumaikota.bps.go.id>

BAB 6

HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN

Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin di Nama Kota Dumai Tahun 2023



Huruf Latin

99,16

Huruf Lainnya

88,37

Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kota Dumai, 2022 dan 2023

<http://dumaikota.bps.go.id>



2022

Rata-rata Lama Sekolah 10,15 tahun

Harapan Lama Sekolah 13,32 tahun

2023

Rata-rata Lama Sekolah 10,16 tahun

Harapan Lama Sekolah 13,33 tahun



Bab 6

Hasil dan Capaian Proses Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berperan sebagai katalisator pembangunan. Tujuan pembangunan pendidikan dalam menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua diharapkan dapat tercapai.

Bab ini mengulas beberapa capaian pembangunan pendidikan melalui indikator pendidikan yang bersumber dari Susenas 2022 dan 2023. Capaian pendidikan dapat ditinjau dari Angka Melek Huruf (AMH) penduduk kelompok umur muda dan dewasa, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas, dan rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas.

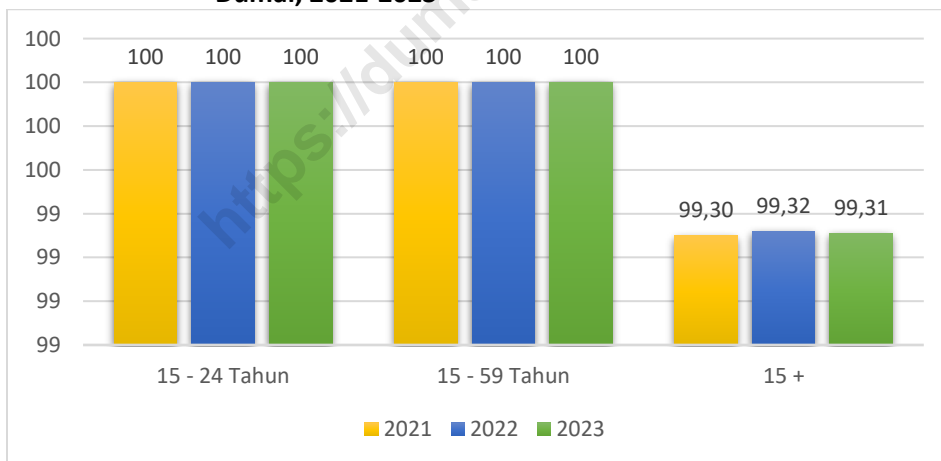
Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi. Dengan kemampuan tersebut seseorang dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya dan berujung pada peningkatan kualitas hidup diri, keluarga bahkan negaranya di berbagai bidang kehidupan. Indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH). Sejak 10 tahun terakhir, AMH digunakan sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Ukuran AMH digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, AMH merupakan salah satu indikator yang menjadi target SDGs pada pilar Sosial, yaitu target 4.6. Implikasi dari ditetapkannya AMH sebagai indikator SDGs adalah pada tahun 2030 ditargetkan semua remaja dan proporsi kelompok dewasa

tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

6.1 Angka Melek Huruf

Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan baca-tulis yang baik, maka akses terhadap pengetahuan semakin terbuka. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH). AMH dapat diinterpretasikan sebagai seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk membaca dan menulis sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pengetahuan dan keterampilan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Gambar 6.1 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kelompok Umur di Kota Dumai, 2021-2023



Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2023

Selama tahun 2021-2023, AMH disetiap kelompok umur beberapa mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, angka melek umur kelompok umur 15 tahun keatas belum mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan, terdapat penduduk yang berusia diatas 59 tahun, yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis.

6.2 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan penduduk Kota Dumai didominasi oleh pendidikan SMA/ sederajat dan ke Atas. Dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, 51 orang yang menamatkan pendidikan SMA/ sederajat dan ke Atas pada tahun 2023 di Kota Dumai (Tabel 6.1). Pada tahun 2023 masih terdapat penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang tidak memiliki ijazah yaitu sebesar 6,43persen.

Tabel 6.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi, 2021-2023

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijazah	7,37	6,54	6,43
SD/Sederajat	19,29	20,11	19,26
SMP/Sederajat	19,89	21,17	22,82
SMA/Sederajat dan ke Atas	51,95	52,18	51,49

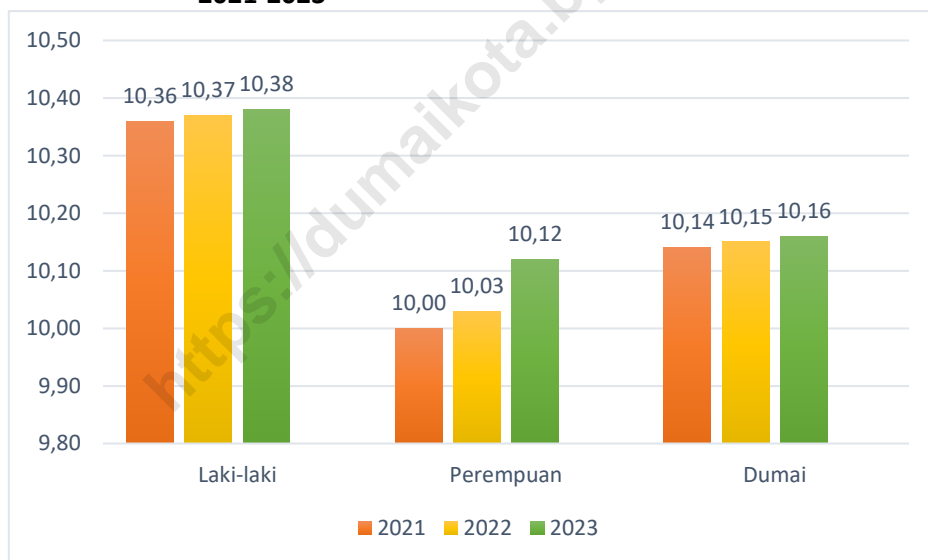
Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2021, 2022 dan 2023

6.3 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang menjadi sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun, dan seterusnya. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang Pendidikan yang ditamatkan. Sampai sejauh mana kemampuan penduduk Kota Dumai usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan dibangku sekolah juga dapat dilihat dari indikator ini.

Gambar 6.2. Rata-rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2021-2023



Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2021, 2022 dan 2023

Gambar 6.2 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Dumai pada tahun 2023 mencapai 10,16 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 25 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMA (kelas X) atau putus sekolah SMA (Kelas XI).

Selama 3 tahun terakhir rata-rata lama sekolah Kota Dumai mengalami peningkatan walaupun belum signifikan, masih dikisaran 10 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sama selama tahun 2021 hingga tahun 2023.

<https://dumaikota.bps.go.id>

HASIL PERHITUNGAN SAMPLING ERROR



Hasil Penghitungan *Sampling Error*

Estimasi dari sampel survei dipengaruhi oleh dua jenis *error* (kesalahan) yaitu *sampling error* dan *non-sampling error* (seperti kesalahan dalam wawancara dan kesalahan pengolahan). *Sampling error* adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik sampling dalam suatu survei. Besarnya *sampling error* secara teori statistik ditunjukkan oleh besarnya angka *standard error* dari suatu angka estimasi persentase suatu variabel yang disajikan dari hasil Susenas 2022 dan 2023. Untuk mengukur presisi dari suatu angka estimasi digunakan besarnya *relative standard error*, yaitu rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%).

Standard error juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

RSE \leq 25% dianggap **akurat**

RSE $>$ 25% tetapi \leq 50% perlu **hati-hati** jika ingin digunakan

RSE $>$ 50% maka nilai estimasi tersebut dianggap **sangat tidak akurat**

Salah satu cara mengatasinya yaitu dengan menggabungkan estimasi tersebut dengan estimasi lain untuk mendapatkan nilai estimasi yang RSE-nya lebih kecil.

Tabel 1. Sampling Error Angka Partisipas Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai, 2023

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD Sederajat	98,84	97,11	99,54	0,55
SMP Sederajat	83,31	76,20	88,61	3,77
SMA Sederajat	64,84	55,39	73,24	7,08
Perguruan Tinggi (19-23 Tahun)	27,81	19,98	37,28	15,95

Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2023

Tabel 2. Sampling Error Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2023

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	81,06	71,94	87,72	4,94
Perempuan	82,70	75,23	88,26	4,00
Laki-laki dan Perempuan	81,88	74,83	87,28	3,86

Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2023

Tabel 3. *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai, 2023

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD Sederajat	68,60	57,84	77,68	7,44
SMP Sederajat	90,22	80,54	95,36	3,99
SMA Sederajat	98,10	88,46	99,71	1,85
Perguruan Tinggi	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2023

Tabel 4. *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Bekerja Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2023

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	12,33	8,38	17,78	19,23
Perempuan	7,04	4,30	11,32	24,74
Laki-laki dan Perempuan	9,73	6,99	13,39	16,58

Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2023

Tabel 5. Sampling Error Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Keatas di Kota Dumai, 2023

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	99,66	99,01	99,88	0,19
Perempuan	98,95	97,49	99,57	0,47
Laki-laki dan Perempuan	99,31	98,41	99,70	0,30

Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Maret 2023

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2022. Statistik Pendidikan 2022. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Buku 1 Pedoman Kepala BPS Provinsi, Statistisi Ahli Madya/Koordinator Fungsi Statistik BPS Provinsi, dan Kepala BPS Kabupaten/Kota Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas Maret 2022. Jakarta: BPS.
- Bappenas. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. 2020. Tujuan 4 Metadata SDGs Edisi II. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. 2020. Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023. *Statistik Pendidikan Provinsi Riau 2023*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2022*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.
- Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2023. *Dumai Dalam Angka 2023*. Dumai: BPS Kota Dumai.
- Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai 2022*. Dumai: BPS Kota Dumai.
- Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2023. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai 2023*. Dumai: BPS Kota Dumai.

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



<https://dumaikota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI

Jl. Tuanku Tambusai - Dumai

Telp. (0765) 4300005

Homepage : www.dumaikota.bps.go.id

Email : bps1473@bps.go.id

ISSN 3031-4690



9

773031

469009